

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA : STUDI TERHADAP DESA PANGGUNGHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019-2020

Andika Alam Nugraha^a, Juhari Sasmito Aji^b

^{a,b}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Indonesia
E-mail: andikaalam0@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan wilayah administratif yang berada pada tingkatan paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa juga menjadi unsur strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 39 Tahun 2010 dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu membangun ekonomi desa. BUMDes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang didirikan pada Tahun 2013 dapat mengembangkan modal hingga 9 kali dari modal awal yang diberikan oleh desa. Salah satu program yang dijalankan adalah Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) yang menjadi potensi pengembangan ekonomi BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo dalam perkembangan BUMDes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara dan observasi, serta dokumen dari laporan akhir atau laporan tahunan BUMDes Panggung Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang menerima manfaat dari BUMDes Panggung Lestari yaitu partisipasi yang berpengaruh dan berjalan dengan baik (partisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil program BUMDes), serta partisipasi yang kurang berpengaruh dan kurang berjalan dengan baik (partisipasi dalam perencanaan dan monitoring evaluasi).

Kata Kunci: Perkembangan BUMDes, Partisipasi Masyarakat, Desa Panggungharjo

PARTICIPATION OF THE PEOPLE OF PANGGUNGHARJO VILLAGE, SEWON SUBDISTRICT, BANTUL REGENCY IN THE DEVELOPMENT OF BUMDES PANGGUNG LESTARI IN 2019-2020

ABSTRACT

The village is an administrative area that is at the lowest level in the government system in Indonesia. The village is also a strategic element in village economic development. In accordance with the Minister of Village Regulation Number 39 of 2010 a Village Owned Enterprise (BUMDes) was formed to help build the village economy. Panggung Lestari BUMDes, Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency which was established in 2013 can develop capital up to 9 times the initial capital provided by the village. One of the programs implemented is the Waste Management Business Group (KUPAS) which is a potential economic development for BUMDes. The purpose of this study was to analyze the participation of the people of Panggungharjo Village in the development of BUMDes Panggung Lestari, Panggungharjo Village. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method, with interviews and observation methods, as well as documents from the final report or annual report of BUMDes Panggung Lestari. The results showed that the participation of the people who received the benefits from BUMDes Panggung Lestari was participation that was influential and went well (participation in the implementation and utilization of the results of the BUMDes program), and participation that was less influential and less well run (participation in planning and monitoring evaluation).

Kata Kunci: Development of BUMDes, Community Participation, Panggungharjo Village

* Corresponding Author. Tel : Andika Alam Nugraha
E-mail : andikaalam0@gmail.com

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perkembangan badan usaha milik desa (BUMdes), Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020. Desa merupakan wilayah terkecil secara administratif di Indonesia yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat (Anggraeni, 2016). Dalam *Nawa Cita* Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan wilayah akan dimulai, dikonsentrasikan dan difokuskan dari daerah pinggiran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya alokasi Dana Desa dari dana APBN.

Menurut Undang-Undang desa, besaran dana desa adalah 10% dari APBN yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Terdapat 3 (tiga) tujuan pokok di berikannya dana desa, yaitu *Pertama*, pembiayaan pembangunan desa, *Kedua*, menjalankan pemerintahan desa, *Ketiga*, sebagai dana untuk memberdayakan masyarakat desa itu sendiri (Sari & Abdullah, 2017). Dalam mengatur dana desa tersebut, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur dana desa sesuai dengan konsep otonomi desa (Kusmana, 2018). Penggunaan dana desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa (Kalpika Sunu & Suyana Utama, 2019).

Lebih jauh, dengan diberikannya dana desa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa terutama pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hakikatnya pembangunan desa memiliki tujuan memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Budiono, 2015). Di sisi lain pemerintah desa juga menjadi unsur strategis pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dimana hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tercapainya stabilitas antar wilayah yang

dinamis.

Pemerintah desa adalah salah satu organ negara dalam mencapai tujuan administrasi negara, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dalam rangka pembagunan nasional yang bertujuan kesejahteraan rakyat yang merata (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Salah satu cara yang dianggap efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian desa yaitu dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Samadi et al., 2015). BUMDes merupakan lembaga atau badan perekonomian desa berbadan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola bersama masyarakat secara mandiri dan juga profesional yang sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari aset atau kekayaan milik desa yang dipisahkan (Dewi, 2014).

Dalam perencanaan dan pembentukannya, BUMDes diinisiasi oleh masyarakat dengan mendasarkan kepada prinsip partisipatif, kooperatif dan juga emansipatif, serta dua prinsip mendasar lainnya yaitu *member base* dan juga *self help* (Ramadana & Ribawanto, 2013). Sebagai sebuah badan usaha, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus sebagai lembaga komersial. BUMDes sebagai suatu lembaga sosial berperan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes mencari dan memperoleh keuntungan dari menawarkan barang atau jasa (lokal) kepada pasar (D. Prasetyo & Irwansyah, 2020).

Terdapat banyak jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes, seperti penjualan hasil pertanian, penyaluran sembako, pemanfaatan hasil industri kecil dan rumah tangga yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan sesuai dengan kemampuan atau potensi kebutuhan pasar (Tiballa, 2017). Dengan didirikannya BUMDes di suatu desa diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan usaha dan potensi yang

dimiliki desa, membangun desa, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa, diantara salah satunya dengan pemberian bansos (bantuan sosial) pada masyarakat miskin, hibah serta pembentukan kegiatan atau program dana bergulir yang ditetapkan di APBDes (Prasetyo, 2016).

Sama halnya dengan BUMDes yang ada di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY yaitu BUMDes Panggung Lestari. BUMDes ini berdiri pada Tahun 2013 sebagai upaya untuk mendayagunakan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengangkat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDes Panggung Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama “KUPAS” yang merupakan singkatan Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah.

Didirikannya Unit KUPAS berawal dari sebuah keprihatinan terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh semakin banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Pada mulanya Unit KUPAS ini berangkat dari “KUPAS di 1 (satu) Tingkat Pedukuhan” melalui program pemberdayaan masyarakat, lalu berkembang dan bermetamorfosis menjadi Unit KUPAS pada tingkat Desa pada Tanggal 25 Maret 2013 dengan mengusung *tagline* program kerja “Peduli Sampah Untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”. Selanjutnya, Unit KUPAS memiliki wewenang untuk mengelola 13 pedukuhan lainnya.

Unit usaha pengelolaan sampah KUPAS berlandaskan terhadap Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tagline “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”, yang dilekatkan terhadap unit usaha KUPAS memiliki makna bahwa harapannya dapat membawa secara bersama kekuatan masyarakat desa dengan orientasi peduli masa depan anak. Hal ini merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakat Desa Panggungharjo dengan potensinya yang besar melalui pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah *klasik* di wilayah Desa Panggungharjo.

Dalam beroperasi, KUPAS berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan akhir Tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. Lebih jauh, Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp 344.363.500,- atau meningkat lebih dari 9x dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp 37.000.000,- .

Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDes Panggung Lestari melalui Unit usaha KUPAS telah membuka lapangan kerja langsung paling tidak terhadap 20 orang. Kehadiran Unit KUPAS juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat Rukun Tetangga (RT) maupun pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang.

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan KUPAS:

1. Terkelolanya sampah rumah tangga di desa sehingga tercipta lingkungan hidup pedesaan yang sehat.
2. Terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa dari berkembangnya kegiatan ini.
3. Memberikan percontohan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Indonesia.

Dengan keberhasilan yang dicapai oleh BUMDes Panggung Lestari tersebut, maka dirasa menarik untuk kemudian dilakukan penelitian. Artikel ini berangkat dari penelitian terdahulu seperti penelitian oleh (Nugroho, 2015) dan (Ihsan, 2018) yang berfokus pada dampak BUMDes kepada perkembangan masing-masing desa, serta penelitian oleh (Liow et al., 2018) dan (Novita, 2017) yang berfokus pada implementasi dan pengelolaan BUMDes, artikel ini berfokus pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam perkembangan BUMDes. Seperti yang diketahui bahwa dalam menjalankan suatu program diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat, karena program BUMDes dibuat oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, serta hasil dari kegiatan atau program BUMDes juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan jawaban yang diberikan oleh responden guna menjawab permasalahan yang akan diteliti (Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif secara deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan atau menjabarkan suatu fenomena yang diteliti (baik itu suatu kejadian atau tindakan) menjadi kata-kata (deskripsi) (Sugiyono, 2012). Metode penelitian ini

dipilih karena lebih mudah dalam mendeskripsikan, menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian, terutama karena data-data yang diperoleh berasal dari wawancara terhadap narasumber, sehingga hasil penelitian akan dapat dipahami dengan jelas dan mudah oleh pembaca. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi terhadap narasumber yaitu masyarakat Desa Panggungharjo, pengurus BUMDes dan juga pemerintah Desa Panggungharjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan BUMDes Panggung Lestari

Partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta atau keikutsertaan dari seseorang ataupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan (Fadil, 2013). Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dari masyarakat dalam suatu pembangunan yang didalamnya meliputi partisipasi awal (perencanaan) dan implemementasi (pelaksanaan) program yang dikerjakan di dalam lingkup masyarakat (Adisasmita, 2006). Untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan/perkembangan BUMDes Panggung Lestari, digunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

a. Adanya Pelibatan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Program

Dalam tahapan ini masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes Panggung Lestari. Hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan program BUMDes dibahas oleh BUMDes bersama dengan Pemerintah Desa Panggungharjo dan BPD Panggungharjo. Sedangkan masyarakat hanya terlibat dalam proses penyampaian aspirasi melalui kegiatan musyawarah desa. Lebih jauh disebabkan BUMDes memiliki

struktur dibawah desa, sehingga desalah yang memutuskan dan berkoordinasi dengan BUMDes tentang program apa yang akan diambil dan dijalankan oleh BUMDes. Sesuai dengan laporan BUMDes dalam *company profile* 2019-2020:

“Pada tahun 2013 melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga Pemerintah Desa panggungharjo membentuk Peraturan Desa (Perdes) Panggung Lestari dan KUPASDA”.

Perdes tersebut dibentuk guna menciptakan bisnis model yang akan digunakan dalam usaha KUPAS yang bergerak di bidang lingkungan. Dalam pembentukannya, yang dilibatkan adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggungharjo sebagai pelaksana dan juga pengawas. Sehingga proses perencanaan program BUMDes Panggung Lestari dimulai dengan menyusun rencana kegiatan atau program yang dilakukan oleh BUMDes bersama dengan pemerintah desa sebagai penasihat dan BPD sebagai pengawas. Setelah itu, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang masyarakat desa untuk menjelaskan program atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh BUMDes. Pada tahapan musyawarah desa ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, saran atau pendapat mereka. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Arief sebagai Direktur BUMDes:

“Musyawarah tentang pembentukan program dilakukan BUMDes bersama dengan pemerintah desa dan BPD, setelah itu pemerintah desa melaporkannya kepada masyarakat tentang program-program BUMDes melalui musyawarah desa.”

Gambar1. Musyawarah Desa Panggungharjo Tahun 2020



Sumber: panggungharjo.desa.id

Selain itu, di dalam tahapan perencanaan program menurut Direktur BUMDes, apabila dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang masyarakat umum tanpa ada rencana kegiatan yang sudah dibentuk, maka akan lebih sulit untuk melihat dan menentukan potensi yang akan digali oleh BUMDes. Seperti halnya pembentukan program unit usaha Kampung Mataraman yang bergerak dibidang kuliner pariwisata, dimana pembentukan unit usaha tersebut tidak terlalu menguntungkan masyarakat secara langsung akan tetapi program tersebut dibutuhkan sebagai penopang ekonomi BUMDes, namun lebih jauh untuk keuntungan masyarakat Desa Panggungharjo, unit usaha kampung mataraman tidak berdampak langsung. Sehingga dalam perencanaan program hanya dibahas oleh pengurus dan pengelola BUMDes dengan Pemerintah Desa dan BPD. Sedangkan program baru seperti PasarDesa.id yang baru dijalankan sejak awal pandemi 2020, program tersebut direncanakan oleh pemerintah desa dan BUMDes sebagai perantara antara pemerintah desa dengan masyarakat sasaran program.

b. Adanya Pelibatan Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Anggaran

Untuk keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan anggaran BUMDes Panggung Lestari juga dilakukan secara tidak langsung, dimana masyarakat hanya terlibat di dalam musyawarah desa yang diadakan untuk melaporkan hasil perencanaan anggaran yang sudah dibuat, sedangkan perencanaannya

dibentuk dan disusun oleh BUMDes bersama dengan pemerintah desa dan BPD. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arief:

“Iya, jadi untuk perencanaan anggaran juga dibahas di musyawarah desa (musdes). Jadi prosesnya dimulai dari perencanaan anggaran yang kemudian disampaikan kepada masyarakat modalnya berapa, akan digunakan untuk apa saja dan lain sebagainya, semuanya disampaikan di musdes.”

Hal tersebut karena pembentukan BUMDes dilaksanakan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa pada Tahun 2013 memberikan modal awal sebanyak 37 juta guna mendirikan dan menjalankan BUMDes Panggung Lestari. Modal tersebut sebagai pondasi ekonomi BUMDes Panggung Lestari. Dalam pengembangannya, BUMDes maupun desa tidak pernah menarik dana dari masyarakat untuk sumbangan BUMDes. Pada laporan BUMDes Panggung Lestari Tahun 2019-2020 terdapat anggaran dana yang telah digunakan, dimana dari total pemasukan BUMDes pada Tahun 2019-2020 sebesar Rp. 250.361.000 yang dirinci dalam laporan di atas, tidak ada penggunaan dana untuk mengadakan musayawarah ataupun pertemuan antara BUMDes dengan masyarakat umum. Hal ini mendandakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan kegiatan BUMDes Panggung Lestari. Seperti pernyataan Bapak Arief dalam wawancara peneliti:

“Dalam perencanaan anggaran BUMDes hanya dilakukan bersama pemerintah desa dan BPD.”

2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

a. Adanya Pelibatan Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Program

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan program ini adalah partisipasi masyarakat berupa tenaga. Dalam pengelolaan BUMDes Panggung Lestari dibagi menjadi 2 bagian

yaitu sebagai manajemen dan karyawan. Masyarakat dapat terlibat secara langsung menjadi anggota manajemen dan juga karyawan BUMDes. Untuk mengisi posisi manajemen dan karyawan banyak diambil dari masyarakat Desa Panggungharjo. Tujuan itu diambil oleh BUMDes Panggung Lestari guna memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Masyarakat-pun banyak yang menjadi karyawan dan manajemen unit-unit BUMDes Panggung Lestari.

“Untuk karyawan, kita memang hanya mengambil dari masyarakat Desa Panggungharjo, kalau dari luar desa jarang dilakukan, karena seperti yang saya sampaikan di awal, salah satu tujuan BUMDes yaitu sebagai kepanjangan tangan desa untuk memberdayakan masyarakatnya, jadi sebisa mungkin mengangkat dan mengambil karyawannya dari masyarakat Desa Panggungharjo.”

Tabel 1. Data jumlah karyawan BUMDes Panggung Lestari tahun 2019-2020
Sumber: Laporan BUMDes Panggung Lestari tahun 2019-2020

No.	Unit Usaha BUMDes	Jumlah Karyawan Tahun 2019	Jumlah Karyawan Tahun 2020
1.	KUPAS	16 orang	15 orang
2.	UCO	7 orang	Menjadi PT. Sinergi Panggung Lestari
3.	Minyak Nyamplung		
4.	Kampung Mataraman	47 orang	23 orang
5.	Swalayan Desa	6 orang	Berubah menjadi PasarDesa.id dengan karyawan 5 orang
	Total	76 orang	43 orang

Dalam partisipasi ini, terdapat 76 masyarakat pada Tahun 2019 dan 43 masyarakat pada Tahun 2020 Desa Panggungharjo yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Panggung Lestari. Kebanyakan masyarakat bekerja di

unit usaha Kampung Mataraman yang bergerak dibidang kuliner. Hal tersebut karena unit usaha tersebut membutuhkan banyak tenaga dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk karyawan di unit usaha KUPAS, dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Arief, karyawannya diambil dari tunawisma yang berada di wilayah Desa Panggungharjo yang kemudian dibuatkan KTP Panggungharjo, sehingga saat ini sudah menjadi warga Desa Panggungharjo. Seperti yang disampaikan Bapak Arief:

“Untuk unit usaha kupas berjumlah 15 orang yang diambil dari tunawisma yang berada di Desa Panggungharjo, karena mereka tidak tahu dari mana asalnya, kemudian kita berdayakan, kita buat KTP dan sekarang sudah menjadi warga Desa Panggungharjo sekaligus menjadi karyawan di KUPAS.”

Selain itu terdapat juga partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Partisipasi ini diberikan ketika BUMDes melaksanakan dan menjalankan program-programnya, seperti informasi terkait penyebaran unit-unit usaha BUMDes seperti pembukaan unit baru ataupun ikut serta dalam pemasaran melalui gethok tular. Masyarakat juga memberikan informasi tentang keberadaan rumah-rumah warga yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal tersebut sangat membantu BUMDes terutama unit usaha pasardesa.id untuk menjalankan salah satu programnya yaitu melakukan pengantaran sembako hasil pembelian di pasardesa.id milik masyarakat yang menjadi penerima BLT. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan program ini juga ditunjukkan oleh masyarakat yang menjadi pelanggan unit usaha KUPAS, mereka berpartisipasi dengan cara mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga yang mereka miliki, kemudian dikumpulkan dan akan diambil oleh petugas KUPAS.

Jadi, untuk partisipasi pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi secara langsung menjadi karyawan atau

manajemen di BUMDes Panggung Lestari. Hal tersebut karena pelibatan masyarakat melalui kepanitiaan lain atau sukarelawan tidak ada. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan secara tidak langsung adalah dengan memberikan informasi-informasi kepada BUMDes yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan BUMDes Panggung Lestari.

“Kalau untuk pembentukan panitia tidak ada, akan tetapi apabila kita membutuhkan tenaga kerja atau karyawan, kita akan menghubungi masyarakat Desa Panggungharjo terlebih dahulu.”

b. Adanya Partisipasi dalam Bentuk Pemeliharaan Hasil dari Kegiatan

Partisipasi pada tahap pemeliharaan hasil dilakukan oleh masyarakat Desa Panggungharjo dengan cara berlangganan di setiap unit usaha BUMDes Panggung Lestari. Masyarakat yang berpartisipasi pada tahap ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Misalnya pada KUPAS yang bergerak di bidang pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo memiliki 1092 pelanggan yang merupakan masyarakat desa yang tersebar di 14 dusun di Desa Panggungharjo dan ada 3 desa yang berbeda. Berikut ini merupakan sebaran jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan menjadi pelanggan unit usaha KUPAS:

Tabel 2. Daftar Sebaran Pelanggan KUPAS

No.	Wilayah Padukuhan	Jumlah	Wilayah Desa
1.	Krapyak Kulon	376	Panggungharjo
2.	Krapyak Wetan	25	Panggungharjo
3.	Glugo	296	Panggungharjo
4.	Pelemsewu	14	Panggungharjo
5.	Dongkelan	0	Panggungharjo
6.	Kweni	0	Panggungharjo
7.	Sawit	15	Panggungharjo
8.	Jaranan	1	Panggungharjo
9.	Pandes	114	Panggungharjo
10.	Glondong	53	Panggungharjo

11.	Ngireng-ireng	60	Panggunharjo
12.	Geneng	63	Panggunharjo
13.	Cabeyan	25	Panggunharjo
14.	Garon	0	Panggunharjo
15.	Minggiran	28	Pendowoharjo
16.	Kali Putih	17	Pendowoharjo
17.	Kel. Bangunharjo	5	Bangunharjo
	Jumlah	1.092	

Sumber: Laporan BUMDes Panggung Lestari tahun 2019-2020

Dalam partisipasi ini masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan ikut serta dalam berlangganan di unit usaha KUPAS sebagai pengambil sampah ditepatnya. Partisipasi dalam tahap ini tergolong sangatlah tinggi dibandingkan dengan unit-unit usaha lain dalam hal pemeliharaan hasil. Selain itu masyarakat juga ikut serta memilah sampah organik dan anorganik serta sampah yang bisa dijual kembali. Hal tersebut merupakan partisipasi pada tahap pemeliharaan hasil dari kegiatan BUMDes Panggung Lestari. Selain itu, pada unit usaha PasarDesa.id, masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan cara membelanjakan uang atau dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh desa.

Saat ini, ada sekitar 200 KK yang memperoleh dana BLT dengan jumlah Rp. 300.000/KK, dana tersebut kemudian wajib dibelanjakan di pasar desa. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah dan membantu masyarakat dalam membelanjakan dana yang telah diberikan karena harga-harga barang pokok yang dijual lebih murah jika dibandingkan dengan di toko-toko atau swalayan, sekaligus mengurangi penyalahgunaan dana oleh masyarakat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Cara tersebut selain bertujuan untuk mempermudah masyarakat, juga sebagai upaya yang dilakukan oleh BUMDes agar unit usaha PasarDesa.id dapat tetap berjalan. Seperti

yang disampaikan oleh Ibu Peni Suryani selaku Manajer PasarDesa.id:

“Sampai saat ini terdapat 200 KK yang menerima BLT sebesar 300 ribu dan wajib dibelanjakan di pasedesa.id. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu warga, karena barang-barang yang ditawarkan di pasedesa.id lebih murah dibandingkan di toko atau swalayan, selain itu juga dapat membantu pasedesa.id untuk tetap bisa menjalankan unit usahanya.”

Gambar 2. Penerimaan BLT



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3. Pemesanan Barang/Sembako di PasarDesa.id



Sumber: Dokumentasi Peneliti

3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring BUMDes Panggung Lestari

Pada tahap ini, monitoring lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Desa secara langsung, karena Kepala Desa merupakan penasihat dari BUMDes Panggung Lestari. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan BUMDes. Pada tahap perencanaan, monitoring atau pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa secara langsung pada saat BUMDes menyusun perencanaan

program dan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Sedangkan pengawasan pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Desa secara berkala dan tahunan.

Pengawasan secara berlaka dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan atau program di setiap unit usaha dapat berjalan dengan baik, dan melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Pengawasan tahunan dilakukan melalui laporan akhir tahun yang dibuat oleh BUMDes yang kemudian diserahkan kepada desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengawasan ini tetap dilakukan guna memastikan apakah realisasi kegiatan sesuai dengan perencanaan, karena setiap kegiatan yang dilakukan akan berpengaruh pada PAD yang diterima desa, serta untuk memastikan apakah pelaksanaan BUMDes sesuai dengan tujuan dan juga sasaran yang ditargetkan oleh BUMDes bersama desa.

Pada tahap monitoring ini, pemerintah desa dan BUMDes kemudian mengadakan musyawarah desa untuk melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan dan program BUMDes kepada masyarakat, hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas desa dan BUMDes kepada masyarakat. Pada musyawarah desa inilah masyarakat melakukan monitoring kegiatan yang sudah berlangsung. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Arief:

“BUMDes merupakan badan usaha dibawah Pak Lurah langsung, masyarakat hanya menjadi pengawas ketika ada musdes, itupun pengawasannya sangat minim, karena kebanyakan masyarakat hanya iya-ya saja, menuruti apa yang disampaikan dan yang diundang hanya perwakilan warganya, seperti pak dukuh, jadi ga semuanya.”

b. Evaluasi BUMDes Panggung Lestari

Dalam tahap evaluasi, BUMDes berfokus pada perbaikan kegiatan dan program, terutama pada aspek bisnisnya, sehingga untuk mengevaluasi, BUMDes Panggung Lestari mengundang atau mendatangkan

tenaga-tenaga ahli yang mengerti (*expert*) pada bidang bisnis guna mengembangkan bisnis yang dijalankan oleh BUMDes Panggung Lestari. Oleh karena itu, pada tahap ini tidak ada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat Desa Panggungharjo. Bahkan masyarakat tidak aktif memberikan kritikan ataupun masukan kepada BUMDes secara langsung atau melalui platform yang dimiliki BUMDes beserta unit-unitnya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Arief:

“Dalam evaluasi kita lebih melibatkan tenaga ahli dari luar yang memang memahami dan mengerti dalam mengevaluasi BUMDes, terutama model bisnis yang direncanakan BUMDes, untuk masyarakat belum pernah terlibat secara langsung dalam memberikan evaluasi atau masukan kepada BUMDes.”

Selain evaluasi yang dilakukan oleh BUMDes, masing-masing unit usaha juga melakukan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan kegiatan mereka. Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit usaha, misalnya PasarDesa.id yang melakukan evaluasi setiap akhir bulan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Peni Suryani selaku manajer BUMDes:

“Kalau di Panggung Lestari ada rapat rutin setiap akhir bulan, yang dibahas misalnya kegiatan selama satu bulan bagaimana, kendalanya apa saja, keuntungan yang didapat berapa, pengeluarannya untuk apa saja, kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk bulan depan dll, setelah itu akan dicari jalan keluarnya agar kegiatan di bulan-bulan selanjutnya dapat berjalan lancar.”

Jadi, pada tahap monitoring dan evaluasi ini, partisipasi lebih banyak didominasi oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan dari BUMDes itu sendiri, sedangkan partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat dikatakan masih kurang.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pemanfaatan Hasil

Pada tahap terakhir ini, ada beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis partisipasi dari masyarakat, yaitu yang *pertama*, adanya pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Panggung Lestari dan yang *kedua*, adanya dorongan dari masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan atau program yang diadakan oleh BUMDes Panggung Lestari.

Untuk indikator pertama yaitu hasil yang diperoleh dan dirasakan masyarakat yang terdiri atas tiga aspek (sosial, ekonomi, lingkungan) masyarakat Desa Panggungharjo merasakan hasil dari ketiga aspek tersebut. *Pertama*, pemanfaatan hasil yang dirasakan dan didapatkan masyarakat melalui aspek sosial yaitu adanya pemberdayaan masyarakat melalui pemberian lapangan pekerjaan dan perekrutan masyarakat menjadi pegawai atau karyawan di unit-unit usaha BUMDes Panggung Lestari. Semua unit usaha di BUMDes Panggung Lestari memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari Desa Panggungharjo, bahkan pegawai yang bukan dari Desa Panggungharjo diharuskan untuk berpindah kartu tanda penduduk (KTP) menjadi warga Desa Panggungharjo. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Panggungharjo. Seperti yang disampaikan Bapak Arief:

“Untuk semua karyawan mulai dari direktur, manajemen sampai pegawai biasa kita memprioritaskan warga Panggungharjo, selain sebagai pemberdayaan masyarakat juga agar masyarakat sadar bahwa mereka dapat ikut serta memajukan BUMDes.”

Kedua, pemanfaatan hasil yang dirasakan dan didapatkan masyarakat melalui aspek ekonomi, dimana masyarakat mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan BUMDes,

misalnya saja pada unit usaha Kampung Mataraman yang bergerak pada bidang kuliner, dimana *supply* bahan-bahan pokok yang digunakan misalnya beras, gula, sayur dan lain sebagainya dari masyarakat Desa Panggungharjo. Selain itu, dari unit usaha PasarDesa.id yang juga mengambil bahan pokok dan barang-barang untuk dijual kembali kepada masyarakat dari warung-warung milik masyarakat desa yang terdampak Pandemi COVID-19. Secara tidak langsung masyarakat akan mendapatkan peningkatan ekonomi dari permintaan kebutuhan di unit-unit BUMDes Panggung Lestari. BUMDes Panggung Lestari tidak melakukan pembagian keuntungan secara langsung kepada masyarakat, akan tetapi pembagian keuntungan (profit) dilakukan antara BUMDes dengan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang kemudian dimasukkan sebagai PAD Desa Panggungharjo. Bapak Arif menyatakan:

“BUMDes Panggung Lestari tidak membagi hasilnya ke masyarakat, tetapi kepada desa sebagai PAD, jadi masyarakat dapat memperoleh hasil melalui bahan-bahan pokok mereka yang dibeli oleh unit-unit usaha BUMDes seperti beras yang dibeli oleh KM dan Pasar Desa.”

Ketiga, pemanfaatan hasil yang dirasakan dan didapatkan masyarakat melalui aspek lingkungan, yaitu manfaat yang diperoleh dari berlangganan unit usaha KUPAS yang bergerak pada bidang pengelolaan sampah. Dari berlangganan atau menjadi pelanggan KUPAS, masyarakat akan memperoleh lingkungan yang bersih karena sampah-sampah rumah tangga dan lain sebagainya secara teratur diambil dan diangkut oleh pegawai KUPAS, sehingga masyarakat akan merasakan kebersihan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah. Seperti yang dikatakan Bapak Riski selaku manajer KUPAS:

“Kita melakukan pengangkutan sampah rutin setiap hari, sehingga masyarakat tidak perlu susah payah ataupun bingung bagaimana

atau dimana harus membuang sampah, selain itu lingkungan masyarakat juga menjadi bersih.”

Gambar 4. Pengangkutan Sampah oleh Unit Usaha KUPAS



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Jadi secara keseluruhan pada tahap ini, masyarakat Desa Panggungharjo memperoleh manfaat dari kegiatan, program dan unit-unit usaha yang ada dan dijalankan oleh BUMDes Panggung Lestari.

Sedangkan indikator kedua yaitu dorongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan program BUMDes datang dari dalam diri masyarakat (internal) dan juga dari BUMDes itu sendiri (eksternal). Secara internal masyarakat terdorong untuk terus berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan program BUMDes karena manfaat yang mereka peroleh dari keberadaan BUMDes Panggung Lestari. Masyarakat dapat mengembangkan diri dan memperoleh pekerjaan dengan menjadi karyawan BUMDes, masyarakat lain juga dapat memperoleh penghasilan dari menjual hasil pertanian mereka ke BUMDes, memperoleh barang dengan harga murah melalui pasar desa dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Vera salah satu karyawan di PasarDesa.id:

“yang mendorong saya untuk tetap ikut berpartisipasi di BUMDes karena saya bisa memperoleh pekerjaan, bisa mengembangkan diri karena bekerja dengan orang-orang yang sudah lama di pemerintah desa, bisa belajar bisnis, mengelola keuangan dan sebagainya.”

Selain itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jumadi, salah satu warga Desa Panggungharjo yang berlangganan PasarDesa.id:

“Kalau saya tetap mau ikut dan berpartisipasi di BUMDes karena saya menjadi salah satu penerima BLT, dan dengan adanya BUMDes dapat mempermudah saya berbelanja kebutuhan pokok yang harganya lebih murah. Dari dana BLT sebesar 300 ribu, dapat dibelanjakan bermacam-macam kebutuhan seperti beras, gula, kecap, minyak goreng, sarden, buah-buahan, saja juga merasa antusias jika datang mengambil barang belanjaan dipasar desa.”

Selain dorongan dari diri masyarakat Desa Panggungharjo, dorongan itu juga datang dari BUMDes, dimana unit usaha melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan atau program mereka. Namun, dari semua unit yang ada, belum semuanya melakukan sosialisasi secara rutin, hanya unit usaha KUPAS yang secara rutin melakukan sosialisasi setiap bulan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat bergabung dengan KUPAS dan berpartisipasi dalam mengurangi serta memilah sampah di Desa Panggungharjo. Meskipun dilakukan sosialisasi secara rutin, tetapi masih belum banyak warga yang ikut bergabung menjadi pelanggan unit usaha KUPAS, dimana baru 20% masyarakat yang menjadi pelanggan tetap unit usaha KUPAS. Seperti yang disampaikan oleh Manajer KUPAS, Bapak Riski:

“KUPAS rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat setiap bulan untuk mengajak masyarakat bergabung di KUPAS dan berpartisipasi untuk memilah sampah karena kita ingin mengembangkan budaya memilah sampah menabung emas, jadi kita rutin melakukan sosialisasi.”

Gambar 5. Sosialisasi Unit Usaha KUPAS



Sumber: panggungharjo.desa.id

Jadi, dorongan untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan dan program BUMDes Panggung Lestari tidak hanya datang dari dalam diri masyarakat, mengingat banyak manfaat yang diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat Desa Panggungharjo tetapi juga dari unit-unit usaha BUMDes Panggung Lestari yang melakukan sosialisasi untuk lebih meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan dan program guna memajukan dan lebih mengembangkan BUMDes Panggung Lestari.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dianalisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) model partisipasi masyarakat yang menerima manfaat dari BUMDes Panggung Lestari yaitu partisipasi yang berpengaruh dan berjalan dengan baik serta partisipasi yang kurang berpengaruh dan kurang berjalan kurang dengan baik.

1. Partisipasi yang berpengaruh serta berjalan dengan baik yaitu *pertama*, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dengan terlibat dan bergabung dalam kepengurus BUMDes serta partisipasi dalam memelihara hasil dari program BUMDes yang sudah terlaksana. Masyarakat mendukung program BUMDes dengan menjadi pelanggan di unit usaha KUPAS dan pasardesa.id. *Kedua*, partisipasi dalam pemanfaatan
2. Partisipasi masyarakat yang kurang berpengaruh serta kurang berjalan baik yaitu yang *pertama*, partisipasi dalam tahap perencanaan karena dalam tahap tersebut, perencanaan program dan anggaran BUMDes dilakukan bersama pemerintah desa, masyarakat hanya dapat ikut serta ketika diadakannya musyawarah desa yang mana rancangan program dan anggaran sudah dibuat. Sedangkan partisipasi yang *kedua* adalah partisipasi dalam tahap monitoring dan evaluasi, dimana monitoring dalam tahapan pelaksanaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penasihat BUMDes. Sedangkan dalam evaluasi dilakukan oleh setiap unit BUMDes dengan mendatangkan tenaga ahli untuk melakukan evaluasi pada model usaha. Masyarakat hanya dapat memberikan masukan atau evaluasi ketika adanya musyawarah desa yang diadakan setahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul*, Yogyakarta. MODUS, 28(2), 155.
- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa*

- Kedungprimpen Kecamatan Kanor*). 4(1), 10.
- Dewi, A. S. K. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. 1, 14.
- Fadil, F. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. 12.
- Ihsan, A. N. (2018). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*.
- Kalpika Sunu, M. K., & Suyana Utama, M. (2019). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 843.
- Kusmana, D. (2018). *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa*. 6(1), 18.
- Liow, H., Lengkong, F. D. J., & Palar, N. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan*. 13.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214.
- Novita, I. (2017). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. 3(1).
- Nugroho, D. A. (2015). *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)*. 7(2), 6.
- Prasetyo, D. & Irwansyah. (2020). *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Prasetyo, R. A. (2016). *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. 15.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian Kualitatif*. 5(9).
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. 1(6), 9.
- Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2015). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. 2(1).
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (9th ed.)*.
- Tiballa, R. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur*. 5(1), 12.